



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.1.7/Kep. 274 -SETDA/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA FASILITAS KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN SEWA (KDOS) II DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan untuk menjaga ketertiban administrasi dan kelancaran Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas jabatan Sewa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon maka perlu ditetapkan pengguna fasilitas kendaraan sewa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Sewa (KDOS) II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengguna Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Sewa (KDOS) II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pendistribusian KDOS dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- KETIGA : KDOS digunakan sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Penggunaan KDOS sebagaimana Diktum KETIGA, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penggunaan KDOS kepada Sekretaris Daerah;
 - b. KDOS dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. KDOS pada masing-masing perangkat daerah sewaktu waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
 - d. KDOS tidak diperbolehkan dimutasikan dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain selama masa kontrak;
 - e. Sekretaris Daerah sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDOS apabila diperlukan;
 - f. KDOS wajib diberikan identitas khas Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa stiker yang telah ditentukan;
 - g. Pemegang KDOS yang sudah tidak menjabat secara otomatis KDOS nya diserahkan ke Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengguna Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Sewa (KDOS) II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan Pendistribusian KDOS dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- KETIGA : KDOS digunakan sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Penggunaan KDOS sebagaimana Diktum KETIGA, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas penggunaan KDOS kepada Sekretaris Daerah;
 - b. KDOS dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. KDOS pada masing-masing perangkat daerah sewaktu waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
 - d. KDOS tidak diperbolehkan dimutasikan dari satu Perangkat Daerah ke Perangkat Daerah lain selama masa kontrak;
 - e. Sekretaris Daerah sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau sebagian KDOS apabila diperlukan;
 - f. KDOS wajib diberikan identitas khas Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa stiker yang telah ditentukan;
 - g. Pemegang KDOS yang sudah tidak menjabat secara otomatis KDOS nya diserahkan ke Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.1.7/Kep. 274 -SETDA/2024
Tanggal : 14 Mei 2024
Tentang : PENETAPAN PENGGUNA FASILITAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL /KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS /LAPANGAN SEWA (KDOS) II

PENGGUNA FASILITAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL/KENDARAAN JABATAN SEWA (KDOS) II

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
1	INSPEKTORAT	SEKERTARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ00432 2	4A91 - KBY2789	E 1553 JD
		INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004315	4A91 - KBY2618	E 1547 JD
		INSPEKTUR PEMBANTU I	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004317	4A91 - KBY2423	E 1544 JD
		INSPEKTUR PEMBANTU II	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004302	4A91 - KBY2238	E 1543 JD
		INSPEKTUR PEMBANTU III	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004276	4A91 - KBY1850	E 1552 JD
		INSPEKTUR PEMBANTU IV	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004323	4A91 - KBY2676	E 1549 JD
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004312	4A91 - KBY2641	E 1546 JD
2	DINAS KESEHATAN	KABID PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY9RK081725	2NR - 4C19155	E 1685 JD
		KABID PELAYANAN KESEHATAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY6RK081732	2NR - 4C17634	E 1664 JD

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
3	DINAS SOSIAL	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY9RK080736	2NR-4C10200	E 1650 JD
		KABID SUMBER DAYA KESEHATAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BYXRK081720	2NR - 4C17962	E 1663 JD
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004308	4A91 - KBY2634	E 1550 JD
		KABID PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY2RK081761	2NR - 4C17952	E 1667 JD
		KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY9RK081773	2NR - 4C19762	E 1687 JD
		KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY6RK081763	2NR - 4C19234	E 1674 JD
4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	KABID REHABILITAS SOSIAL	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK081781	2NR - 4C19477	E 1670 JD
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004325	4A91 - KBY2736	E 1545 JD
		KABID PERMBERDAYAAN PEREMPUAN & PENGARUSUTAMAAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK081783	2NR - 4C19236	E 1669 JD
		KABID KELUARGA BERENCANA KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY6RK081746	2NR - 4C18785	E 1657 JD
		KABID BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY9RK081756	2NR - 4C19763	E 1684 JD

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
		KABID PENGENDALIAN PENDUDUK	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK081768	2NR - 4C19164	E 1656 JD
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004310	4A91 - KBY2568	E 1548 JD
		KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKABIBY7RK080699	2NR - 4C09432	E 1739 DY
		KABID PENGEMBANGAN KOPESENSI APARATUR	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKABIBY7RK079469	2NR - 4C02141	E 1659 JD
		KABID PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKABIBY6RK079222	2NR - 4C00869	E 1665 JD
		KABID PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKABIBY0RK079510	2NR - 4C01110	E 1655 JD
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004515	A491 - KBY6829	E 1579 JD
		KABID PERUMAHAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY2RK082022	2NR - 4C20958	E 1762 JD
		KABID KAWASAN PEMUKIMAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK085770	2NR - 4C41459	E 1072 JF
		KABID PERTANAHAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY3RK082191	2NR - 4C21723	E 1033 JF

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ002908	4A91 - KBQ4661	E 1586 JD
		KABID REHABILITAS DAN REKONSTRUKSI	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY4RK081714	2NR - 4C17621	E 1662 JD
		KABID KEDARURATAN DAN LOGISTIK	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY6RK081715	2NR - 4C17631	E 1676 JD
		KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY2RK081758	2NR - 4C19159	E 1660 JD
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ002922	4A91 - KBQ4967	E 1588 JD
		KEPALA BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY3RK080540	2NR-4C08750	E 1653 JD
		KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK081611	2NR-4C17743	E 1652 JD
		KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK081540	2NR-4C17304	E 1866 JD
9	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ002767	A491 - KBQ2137	E 1594 JD
		KABID KOPERASI	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BYXRK082477	2NR - 4C25201	E 1822 JD
		KABID USAHA MIKRO	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY3RK083048	2NR - 4C27492	E 1863 JD
10	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004597	A491 - KCA2955	E 1598 JD

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
		KABID PENEGAKAN PERUNDANG - UNDANGAN DAERAH	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY4RK082121	2NR - 4C20822	E 1766 JD
		KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA APARATUR	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK082302	2NR - 4C22232	E 1052 MT
		KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY4RK085696	2NR - 4C40906	E 1057 JF
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004551	4A91 - KBY9432	E 1591 JD
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK081458	2NR - 4C16591	E 1715 JD
		KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL & PENANGANAN KONFLIK	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK080811	2NR - 4C11196	E 1716 JD
		KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN, KEBANGSAAN & KETAHANAN EKONOMI	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY3RK080246	2NR - 4C05267	E 1721 JD
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004491	4A91 - KBY6171	E 1581 JD
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KABID STATISTIK, PERSANDIAN & E- GOVERNMENT	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY4RK082037	2NR - 4C21027	E 1759 JD

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
13	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	KABID INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY0RK085338	2NR - 4C40984	E 1056 JF
		KABID TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BYXRK085895	2NR - 4C40589	E 1071 JF
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004525	4A91 - KBY6618	E 1580 JD
		KABID PERIKANAN BUDIDAYA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK082127	2NR - 4C20828	E 1763 JD
		KABID PERIKANAN TANGKAP, PENGOLAHAN & PENGAWASAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY2RK082036	2NR - 4C21657	E 1764 JD
14	DINAS PENDIDIKAN	KABID BIDANG KETERSEDIAAN, KERAWANAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK081382	2NR - 4C15937	E 1817 JD
		KABID KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY3RK083454	2NR - 4C29428	E 1865 JD
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ002596	4A91 - KBP8026	E 1595 JD
		KEPALA BIDANG DINAS PENDIDIKAN SMP	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY6RK081438	2NR - 4C16518	E 1719 JD
		KABID PENDIDIKAN NON FORMAL	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK082073	2NR - 4C20957	E 1765 JD
15	DINAS KEKABUDAYAAN DAN PARIWISATA	KABID PAUD	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK082111	2NR - 4C21026	E 1758 JD
		KABID PENDIDIKAN SD	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY3RK082062	2NR - 4C21022	E 1760 JD
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004514	4A91 - KBY6522	E 1582 JD

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
		KABID DESTINASI & INDUSTRI PARIWISATA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY2RK082070	2NR - 4C20621	E 1761 JD
		KABID KEBUDAYAAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY6RK084565	2NR - 4C34934	E 1075 JF
		KABID PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK084540	2NR - 4C34662	E 1067 JF
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004602	4A91 - KCA2851	E 1590 JD
16	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	KABID KEPEMUDAAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKB1BY3RK085866	2NR - 4C42525	E 1055 JF
17	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	KABID OLAH RAGA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK081852	2NR - 4C20453	E 1675 JD
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MKNCLHATPJ004588	4A91 - KCA2439	E 1596 JD
		KABID SARANA DAN PELAKU DISTRIBUSI	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK083047	2NR - 4C27951	E 1821 JD
		KABID METROLOGI LEGAL	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY9RK082115	2NR - 4C21870	E 1034 JF
		KABID PERDAGANGAN DISPERDAGIN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK082123	2NR - 4C21427	E 1035 JF
18	DINAS PERHUBUNGAN	KABID INDUSTRI	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY9RK081403	2NR - 4C12663	E 1824 JD
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004370	4A91 - KBY3574	E 1584 JD

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KABID LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK079762	2NR - 4C03438	E 1861 JD
		KABID PRASARANA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY2RK086149	2NR - 4C44363	E 1243 EA
		KABID PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK086885	2NR - 4C42661	E 1051 MT
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004522	4A91 - KBY6506	E 1577 JD
		KABID PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATN DATA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY9RK082888	2NR - 4C27357	E 1867 JD
20	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	KABID PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY6RK084498	2NR - 4C34064	E 1066 JF
		KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK084537	2NR - 4C34660	E 1058 JF
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004476	4A91 - KBY4894	E 1585 JD
		KABID PENCEGAHAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY0RK082763	2NR - 4C26219	E 1823 JD
		KABID PEMADAMAN, PENYELAMATAN, SARANA DAN PRASARANA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK082848	2NR - 4C27355	E 1825 JD

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
21	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004482	4A91 - KBY5846	E 1587 JD
		KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK080839	2NR - 4C12320	E 1673 JD
		KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK081706	2NR - 4C18759	E 1689 JD
		KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY6RK081682	2NR - 4C17615	E 1654 JD
		KABID PEREKONOMIAN SUMBER DAYA ALAM	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY4RK081728	2NR - 4C17622	E 1671 JD
		KABID INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BYXRK080860	2NR - 4C11593	E 1658 JD
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK080839	2NR - 4C12320	E 1673 JD
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004558	4A91 - KBY 8188	E 1583 JD
		KABID BINA KONSTRUKSI	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK084566	2NR - 4C34942	E 1068 JF
		KABID PENATAAN RUANG	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY2RK084563	2NR - 4C34681	E 1064 JF
		KABID BINA MARGA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK084568	2NR - 4C34656	E 1074 JF
		KABID BANGUNAN GEDUNG	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK084475	2NR - 4C34290	E 1069 JF

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
		KABID SANITASI DAN PERMUKIMAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY2RK084496	2NR - 4C34438	E 1061 JF
		KABID SUMBER DAYA AIR	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BYXRK084536	2NR - 4C35223	E 1073 JF
23	DINAS PERTANIAN	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004606	4A91 - KCA3485	E 1592 JD
		KABID PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY4RK082653	2NR - 4C25866	E 1820 JD
		KABID HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY7RK082114	2NR - 4C20956	E 1032 JF
		KABID PENYULUHAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY4RK084614	2NR - 4C34945	E 1076 JF
		KABID TANAMAN PANGAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY0RK084559	2NR - 4C34663	E 1059 JF
		KABID NAKKESWAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK082011	2NR - 4C21442	E 1031 JF
		SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MKNCLHATPJ004467	4A91 - KBY5849	E 1578 JD
24	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY3RK082479	2NR - 4C24035	E 1720 JD
		KABID PENGELOLAAN ARSIP	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK083679	2NR - 4C30316	E 1855 JD
		KABID PERLINDUNGAN, PENYELAMATAN, AUTENTIFIKASI DAN PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK084473	2NR - 4C34563	E 1062 JF

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
25	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ002772	4A91KBQ2068	E 1597 JD
		KABID PENGADUAN DAN PENYULUHAN PENANAMAN MODAL	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK082139	2NR - 4C20826	E 1190 EA
		KABID PENGEMBANGAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK083708	2NR - 4C31492	E 1854 JD
		KABID PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY6RK083691	2NR - 4C30314	E 1827 JD
		KABID PELAYANAN ADMINISTRASI PERIJINAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY0RK083797	2NR - 4C31168	E 1860 JD
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ002893	491KBQ3910	E 1610 JD
		KABID TATA LINGKUNGAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY2RK082120	2NR - 4C21025	E 1767 JD
		KABID KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY6RK082492	2NR - 4C22316	E 1864 JD
		KABID PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENATAAN HUKUM	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY3RK084586	2NR - 4C34674	E 1063 JF
		KABID PENGINGKATAN KAPASITAS DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY0RK084514	2NR - 4C34661	E 1065 JF
27	DINAS KETENAGAKERJAAN	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004527	4A91KBY6977	E 1589 JD

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
		KABID PENEMPATAN TENAGA KERJA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK081284	2NR - 4C14732	E 1856 JD
		KABID LATTRANS	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BYXRK082995	2NR - 4C28054	E 1857 JD
		KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY4RK084113	2NR - 4C33252	E 1862 JD
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004621	4A91 - KCA3954	E 1593 JD
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK081723	2NR - 4C17623	E 1686 JD
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY9RK080008	2NR - 4C04301	E 1651 JD
		KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDATAAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY0RK081807	2NR - 4C19157	E 1672 JD
29	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN UMUM	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK081179	2NR - 4C14539	E 1826 JD
		BAGIAN UMUM	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK086949	2NR - 4C48569	E 1103 JF

BUPATI CIREBON,



IMRON

NO	INSTANSI PENERIMA KENDARAAN	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NOMOR RANGKA	NOMOR MESIN	NOMOR STNK
		KABID PENEMPATAN TENAGA KERJA	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK081284	2NR - 4C14732	E 1856 JD
		KABID LATTRANS	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BYXRK082995	2NR - 4C28054	E 1857 JD
		KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY4RK084113	2NR - 4C33252	E 1862 JD
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	SEKRETARIS	XPANDER 1.5L EXCEED	MK2NCLHATPJ004621	4A91 - KCA3954	E 1593 JD
		KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY5RK081723	2NR - 4C17623	E 1686 JD
		KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY9RK080008	2NR - 4C04301	E 1651 JD
		KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDATAAN	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY0RK081807	2NR - 4C19157	E 1672 JD
29	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN UMUM	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY8RK081179	2NR - 4C14539	E 1826 JD
		BAGIAN UMUM	TOYOTA AVANZA 1.5 G CVT	MHKAB1BY1RK086949	2NR - 4C48569	E 1103 JF

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Cirebon
Tanggal : 07 Mei 2024
Nomor : 000.1.7/ 1247 /Umum
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Permohonan Kesediaan Menandatangani Keputusan Bupati Cirebon
Tentang Penetapan Pengguna Fasilitas Kendaraan Dinas
Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Sewa (KDOS) II Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan untuk menjaga ketertiban administrasi dan kelancaran Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas jabatan Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon maka perlu ditetapkan pengguna fasilitas kendaraan sewa.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Fasilitas Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Sewa (KDOS) II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KABUPATEN CIREBON,

SUNANTO, S.STP., M.Si
NIP. 19850723 200412 1 002